

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 06 TAHUN 2013 BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



Oleh

**MAI KURNIA PULUNGAN
11527201039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU -PEKANBARU**

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 06 TAHUN 2013 BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**MAI KURNIA PULUNGAN
11527201039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU -PEKANBARU**

1441 H/2019 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru**

Ditulis Oleh : Mai Kurnia Pulungan


Nim : 11527201039

Program Study : Ilmu Hukum

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosah pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 September 2019

Pembimbing Skripsi


Muslim, S.Ag., SH., M.Hum
NIP.197205052014111002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 06 TAHUN 2013 BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KOTA PEKANBARU yang ditulis oleh :

Nama : Mai Kurnia Pulungan
NIM : 11527201039
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

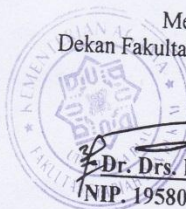
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH
Sekretaris
Musrifah, SH., MH
Penguji I
Dr. H. Suhayib, MA
Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu penulis curahkan kepada Habibullah Nabi Muhammad Sallahu'alaihi wassalam dengan keindahan ajaran ilmu yang disebarkannya dengan mengucapkan "*Allahumma sholli 'alaa sayyidina Muhammad, wa 'ala ali sayyidina Muhammad*".

Skripsi ini yang berjudul "**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 06 TAHUN 2013 BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KOTA PEKANBARU**". Dengan judul skripsi ini merupakan sebuah cita-cita yang panjang bagi penulis untuk segera bisa menyelesaikan program sarjana. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi peneliti yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Akhirnya, cita-cita itu menuntut keberanian penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini diberikan kepada penulis, terutama kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahanda tercinta Suharuddin Pulungan dan Ibundaku tersayang Kesuma wati, terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang tidak pernah lelah untuk mendoakan penulis, dan semangat serta memberikan dukungan baik moril maupun materil dan nasehat untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita. Hal yang sama penulis ucapkan kepada keluarga-keluarga penulis Kakak Nopria Herlim Pulungan, S.pd, Kakakku Rahmayani Pulungan, SP dan Adekku Risky Juita P, terima kasih atas doa dan motivasi selama ini yang selalu menguatkan penulis sampai akhirnya menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini dengan baik;

2. Bapak Dr. Drs H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dn Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Firdaus, SH, MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis;

Bapak Ilham Akbar, SHI, SH, MH selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan pengarahan dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Parade Damanik, S. Sos, selaku Kasubsi. Tata Tertib dan Pelaporan yang telah meluangkan waktu pada saat penelitian dan telah memberikan motivasi kepada penulis;

8. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis;

9. Kepada pegawai perpustakaan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2015 khususnya Lokal Ilmu Hukum A yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis selama bersama-sama berjuang di kampus dan teman-teman konsentrasi Hukum Tata Negara Lokal HTN D yang juga memberikan semangat yang tidak dapat dilupakan oleh penulis;

11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik bagi masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 28 Agustus 2019

Penulis

MAI KURNIA PULUNGAN
NIM. 11527201039



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru.....	18
B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru	19
C. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru	20
D. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru	21
E. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Implementasi	24
B. Tinjauan Umum Narapidana dan Hak-hak Narapidana	26
C. Tinjauan Umum Penahanan	31
D. Tinjauan Umum Pidana Penjara dan Pidana Kurungan	34
E. Tinjauan Umum Pemasyarakatan	36
F. Tinjauan Umum Tata Tertib.....	42

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Pekanbaru	46
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru	56

PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta

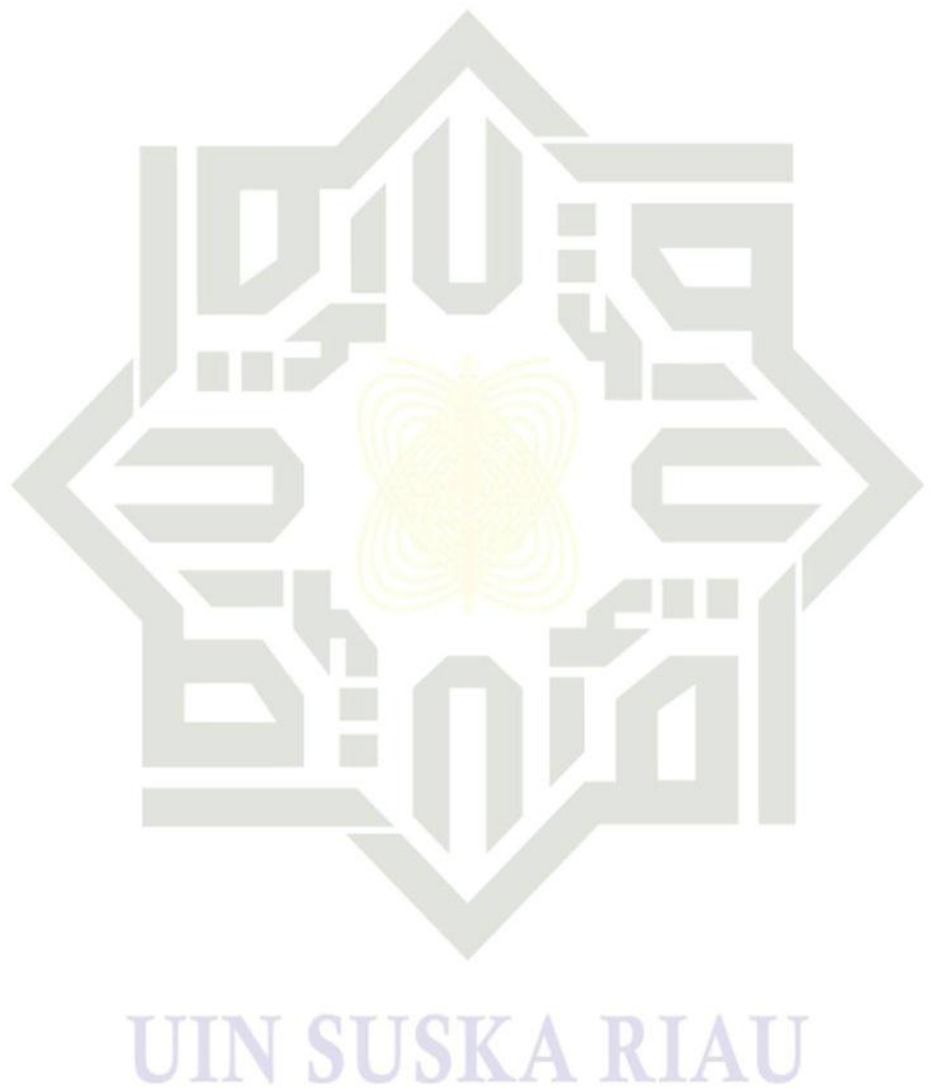
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

abel I.1	Populasi dan Sampel	14
abel IV.1	Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru	50



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Artinya Negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut Negara hukum (*rechstaat*), tidak atas dasar kekuasaan belaka, (*machstaat*). Juga Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warganya. Pemaksaan kehendak tersebut memiliki tujuan agar ketertiban dan keamanan hidup bersama dalam organisasi kekuasaan dapat terwujud. Namun demikian otoritas untuk memaksakan kehendak tanpa dilandasi dengan perangkat aturan akan mengakibatkan Negara melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan menindas.¹

Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambah pula jumlah penduduk Indonesia, maka semakin sulit pula masyarakat mendapatkan lowongan pekerjaan. Dikarenakan hal tersebut maka jumlah pengangguran semakin banyak, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara melakukan kejahatan, mencuri dan lain sebagainya. Para penegak hukum tidak bisa diam, pemberian sanksi merupakan salah satu solusi untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali atau untuk menimbulkan efek jera para pelakunya dengan cara pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi hampir di semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah

¹ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahanan Negara (Rutan) dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Gangguan tidak saja terjadi pada Lapas dan Rutan di ibu kota negara namun juga terjadi di Lapas dan Rutan yang jauh dari ibu kota.² Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang di dalamnya memberikan pembinaan bagi narapidana dengan tujuan selain sebagai suatu perwujudan dari Pasal 10 KUHP yaitu tentang jenis-jenis pidana, lebih khususnya pidana penjara namun juga untuk mengadakan perubahan-perubahan kepada kehidupan yang lebih baik lagi dengan diadakannya pembinaan, serta pengayoman yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengatur Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tepatnya dalam Pasal 4 huruf J berbunyi :

“Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.”

Tetapi dalam kenyataanya di lapangan, bahwasanya masih ada narapidana yang melengkapi fasilitas yang dilarang dalam peraturan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Lembaga yang populer dalam sistem Pemasyarakatan.³ Sudarto memberikan definisi tentang Pemasyarakatan yaitu “istilah Pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditetapkan dalam tata budaya Indonesia,

²Hadi Ainal, *Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Kanun Jurnal Volume 16 Nomor 62, April 2014, h.1

³Anugerah Rizki Akbari, *Perkembangan Sistem Pidanan dan Sistem Pemasyarakatan*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia”. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip Pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.⁴ Jadi Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang dikhususkan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana atau terpidana.

Ada beberapa perbedaan antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Balai Pemasyaraktan (BAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan Penjara. Adapun tentang Lapas dan Bapas sendiri tertera dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 yakni terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4). Adapun Lembaga Pemasyarakatan sendiri menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat terlaksana pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, adapun jumlah LAPAS di Provinsi Riau sendiri berjumlah 8 (Delapan) LAPAS, antara lain sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru.

⁴Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2014),h.226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pekanbaru.
3. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Pekanbaru.
4. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Bengkalis.
5. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Tembilahan.
6. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Bangkinang.
7. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pasir Pengaraian.
8. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Terbuka Kelas III Rumbai.

Penjara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan tempat mengurung orang hukuma, bui, Lembaga Pemasyarakatan dan tempat mereka yang dikenakan hukuman masa tahanan. Penjara adalah tempat dimana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebiasaan. Penjara pada umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem Pengadilan Kriminal suatu daerah ataupun Negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang, sedangkan hukuman penjara sendiri dibedakan antara lain hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara sementara, hukuman penjara sementara minimal 1 Tahun dan maksimal 20 Tahun, dan bagi terpidana yang dipenjara wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun diluar penjara dan terpidana tidak mempunyai hak vistol.⁵ Sedangkan Balai Pemasyarakatan sendiri menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang

⁵Salamat Riadi, Skripsi: *Efektivitas Perlindungan Hak Narapidana wanita Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 4

selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Adapun pengertian dari Rumah Tahanan Negara dan Penjara sendiri adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Indonesia, serta Rumah Tahanan Negara ini merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan jumlah dari Rutan di Provinsi Riau sendiri berjumlah tujuh, diantaranya sebagai berikut:

1. Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Dumai.
2. Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Pekanbaru.
3. Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Rengat.
4. Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Siak Sri Indrapura.
5. Cabang Rumah Tahanan Bagan Siapi-api.
6. Cabang Rumah Tahanan Selat Panjang.
7. Cabang Rumah Tahanan Teluk Kuantan.

Pembinaan Narapidana yang dimaksud bukan hanya pembinaan yang berupa pada prinsip-prinsip pembinaan melainkan termasuk bagaimanakah tata cara membina yang dilakukan pada kenyataannya serta hasil yang didapatkan dari pembinaan itu. Apakah narapidana menjadi seseorang yang lebih baik karena proses pembinaan atau bahkan binaan yang diberikan sama sekali tidak mempengaruhi narapidana tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan Lembaga Pemasyarakatan secara khusus dapat disebut sebagai suatu organisasi atau lembaga yang mempunyai kewajiban membina sekelompok masyarakat karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan lembaga tersebut dapat berfungsi sebagai suatu badan yang benar-benar mampu membina seseorang atau sekelompok orang sehingga dapat lebih baik dari keadaan semula dan menjadi manusia seutuhnya serta tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan.

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjaraan, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bagi Bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada penjaraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan integrasi sosial telah melakukan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem Perasyarakatan. Dari pengertian ini dapat ditarik suatu benang merah bahwa “Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu badan atau organisasi yang mengatur sekelompok orang sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu”.

Oleh sebab itu setiap petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama warga Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga Binaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan juga harus menaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, pengormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas Pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama.⁶ Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Lambang Pemasyarakatan ini ditetapkan dalam Keputusan Menkeh RI No. M.09.KP.10.10 Tahun 1997. Namun demikian sejarah dari penjara ke

⁶Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan tak serta-merta ada begitu saja, tapi ternyata telah melalui proses panjang yang cukup berliku-liku dimulai sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang itu tentu dalam upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa kita, tapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya terutama setelah perang dunia kedua.

Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara kedudukannya kini dalam kondisi yang paradoks, dimana pada satu sisi harus memperhatikan hak-hak penghuni (baca: napi dan tahanan) dan di sisi lain petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum. Apalagi sekarang seiring era reformasi bergulir di negeri ini, wacana hak asasi manusia begitu gencarnya ditegaskan, baik itu dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), praktisi hukum, bahkan sampai pada masyarakat umum dengan penerapan program bernama Keluarga Sadar Hukum (kadarkum).⁷ Narapidana adalah orang yang melakukan kejahatan sehingga mengharuskan dirinya di kurung dalam penjara. Betapapun, napi adalah manusia, dan sangat wajar kalau mereka tetap ingin diperlakukan sebagai manusia.

Sebagaimana pernah ditegaskan Dr. Sahardjo S.H., tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

⁷Yoga Bahtiar, *Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Ilmiah 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lambang Pemasyarakatan bagi Lembaga Pemasyarakatan, yaitu “griya winaya jamna miwarga laksa dharmmesti”, yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik. Berdasarkan pokok prinsip yang telah dikemukakan oleh Sahardjo, salah satu prinsip pokok dalam pembinaan narapidana adalah “Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan”. Untuk membuat seseorang tobat itu dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan kepada narapidana dalam bidang Agama, sehingga diharapkan apabila seorang narapidana telah selesai menjalani hukumannya maka narapidana tersebut tobat dan tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi.

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang disangka melakukan suatu pelanggaran disiplin, ternyata Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal demikian, maka terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut dijatuhkan itu haruslah seimbang dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhi kepadanya. Harus diketahui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga.

Kepatuhan terhadap Tata Tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjadi salah satu indikator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Menyikapi berbagai gangguan terhadap keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 menerbitkan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Adapun pertimbangannya antara lain untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lapas dan Rutan; adanya Tata Tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin; dan sebagai salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Untuk itu, sistem Pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, mendapat upah atas pekerjaan, dan memperoleh bebas bersyarat. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya

para petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum.

Dalam tulisan ini dipaparkan beberapa potensi gangguan keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan dengan mendasarkan bahan kajian pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan faktor-faktor penyebabnya.

B. Batasan Masalah

Sehubung dengan latar belakang diatas, maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi tentang Pelaksanaan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Kemenkumham Nomor 06 Tahun 2013 Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Kemenkumham Nomor 06 Tahun 2013 Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan peraturan kemenkumham nomor 06 Tahun 2013 bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIA kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Kemenkumham Nomor 06 Tahun 2013 Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan peraturan kemenkumham Nomor 06 Tahun 2013 bagi narapidana lembaga pemasyarakatan klas IIA kota pekanbaru.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama pada bidang Hukum Tata Negara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pemahaman mengenai pelaksanaan peraturan kemenkumham nomor 06 Tahun 2013 bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIA kota pekanbaru, sehingga dapat berguna bagi orang lain.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru yang beralamat pada Jl. Pemasyarakatan No. 19 Cinta Raja Sail Kota Pekanbaru Riau. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena objek penelitian berada di tempat tersebut.

3. Subjek dan Objek penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Pekanbaru.

b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), h.61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau, sifat yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁹ Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Subsi Pengamanan dan Ketertiban, serta Staff Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan *purposive sampling* (memilih sampel dengan cara memilih sesuai kriteria tertentu).

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Ket
1	Ka. Subsi Pelaporan dan Tata Tertib	1	1	100%
2	Staff	13	5	65%
	Jumlah	14	6	-

Sumber : Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, dan wawancara.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang didapat dari Kasubsi. Pelaporan dan Tata Tertib dan Staff LAPAS Kelas IIA Kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari Buku-buku, Karangan Ilmiah, literatur Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.ke - 5, h.11

¹⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Cet.ke-6, h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Primer maupun Sekunder misalnya, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lainnya.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari Kasubsi. Pelaporan dan Tata Tertib LAPAS dan Staff LAPAS tersebut.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu mencari dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang tata cara penelitiannya menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian

yang terang dan rinci. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi V(lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyaraktan Kota Pekanbaru, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian narapidana dan hak-hak narapidana, pengertian pidana penjara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kurungan, pengertian penahanan, dan Pengertian Pemasyarakatan.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

Bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang membahas tentang bagaimana Proses Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru dan bagaimana faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah pulau sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tingkat 1 Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota. Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, Sebelah Barat Kabupaten Kampar.¹¹

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau. Letak geografis Kota Pekanbaru sangat strategis, selain sebagai ibu Kota

¹¹ <http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintah, pendidikan, dan perdagangan serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa, maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan bagi masyarakat (pencari kerja) yang berasal dari daerah-daerah lain disekitar Kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah provinsi lain di Indonesia. Sedangkan data iklim Kota Pekanbaru oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) wilayah Kota Pekanbaru tahun 2009 berkisar 27,2° - 31,0°C dengan rata-rata 28,1°C, sinar matahari 48,3%, kelembapan udara berkisar 72% -78,9%, serta kecepatan angin 3-6 knot/jam.¹²

B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Kota Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru kota bertuah (**Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis**), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 62,23 KM2, Kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus berkembang. Lapas Klas IIA Kota Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status "**Penjara**", terletak di jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad Yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

¹²Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Kebudayaan Dan Parawisata, *Geografi Parawisata Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Kebudayaan Dan Parawisata, 2008), 3-4

Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² di atas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 LAPAS KLAS IIA KOTA PEKANBARU mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai saat ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau.

C. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru

Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Misi

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia;
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan;
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.¹³

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru

Tugas

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

1. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan social atau kerohanian narapidana/ anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fungsi

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru melakukan fungsi untuk:

1. Melakukan pembinaan dan perawatan Narapidana;
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

¹³ <http://lapaspekanbaru.com/visi-dan-misi->



3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Pekanbaru; dan
5. Melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.¹⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

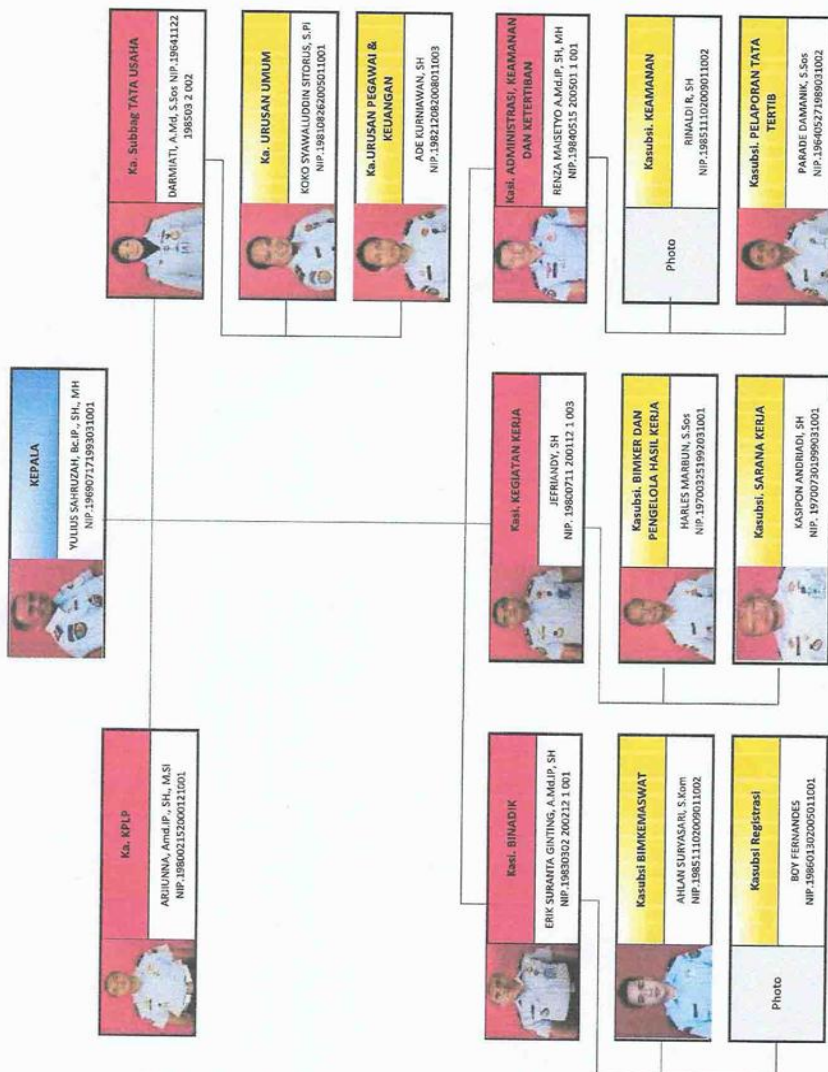
IK UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁴ <http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-stuktur-organisasi?view=categoryhuruf&id=30>

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.¹⁵ Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai dan tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

1. Faktor Keberhasilan Implementasi

Sebagaimana telah dikatakan oleh pakar, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran

¹⁵Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2014),h.139

kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecah permasalahan yang dihadapi.

D.L. Weimer dan Aidan R. Vining menyatakan setelah mempelajari berbagai literatur tentang implementasi, menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:¹⁶

- a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah diterapkan.
- b. Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama telah merupakan suatu *assembling produktif*.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

2. Faktor Penghambat Implementasi

Menurut Jan Merse mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:¹⁷

- a. Informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk menyatukan pemahaman visi dan misi dan kebijakan yang dirumuskan. Terjadinya kekurangan informasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

¹⁶Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010),h.59

¹⁷Tangkilisan, *Enam Dimensi Srategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*,(Yogyakarta: Gava Media, 2004),h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Isi kebijakan implementasi dapat dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketetapan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.
- c. Dukungan, sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
- d. Pembagian potensi yaitu pembagian potensi antar para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang.

Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya dimana tujuan telah tercapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

B. Tinjauan Umum Narapidana dan Hak-hak Narapidana

1. Narapidana

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Hak-hak Narapidana

Hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dimana peraturan pemerintah ini membahas secara lebih terperinci mengenai hak-hak yang diberikan kepada Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, setiap Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain berhak untuk melakukan ibadah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 juga tercantum mengenai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.

2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Perihal hak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mencantumkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, perawatan rohani dan jasmani dilakukan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Mengenai hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Peraturan Pemerintah ini mencantumkan bahwa setiap Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ini tercantum bahwa setiap Narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

5. Menyampaikan keluhan.

Setiap orang yang hidup pasti mempunyai masalah sehingga menimbulkan keluhan yang menghasilkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut maka seseorang bisa saja membutuhkan orang lain yang di percayainya untuk menyampaikan keluhannya atau saling bercerita untuk mendapat jalan keluarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

Untuk menambah wawasan para Narapidana, maka hak Narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 perihal hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa, setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan dan media massa baik berupa media cetak maupun media elektronik yang dapat menunjang program pembinaan kepribadian Narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Setiap Narapidana yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah atau premi yang mana besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan, sedangkan premi diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Hak Narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu dan lainnya adalah salah satu hak yang wajib diberikan kepada para Narapidana, di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia wajib menyediakan suatu ruangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekurang-kurangnya 1 ruangan khusus untuk menerima kunjungan tersebut.

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Hak untuk mendapatkan remisi, setiap Narapidana yang menjalankan masa pidananya berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan remisi. Remisi dapat ditambah apabila Narapidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Narapidana berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Untuk cuti mengunjungi keluarga diberikan paling lama 2 hari atau 2 x 24 jam, serta keluarga bertanggung jawab atas Narapidana yang cuti untuk mengunjungi keluarga.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Setiap Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik.

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas setelah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Yang dimaksud dengan hak-hak lain disini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Yang dimaksud dengan hak keperdataan disini antara lain adalah surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya dan izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa.

C. Tinjauan Umum Penahanan

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP bahwa: “Menahan seseorang berarti orang itu diduga telah melakukan salah satu tindak pidana yang ada dalam ketentuan Pasal ini”.¹⁹ Penahanan didefinisikan dalam KUHP sebagai suatu tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan persidangan. Sama halnya dengan penangkapan, penahanan tidak paralel dengan proses penyidikan harus disertai dengan tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa.²⁰ Menurut Pasal 1 angka 12 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di

¹⁸Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Narapidana Pasal 14 Ayat (4)

¹⁹Hendrastanto Yudowidagdo, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Bina Askara, 1987),h.129

²⁰Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara pidana di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017),h.86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini²¹

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas. Yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali.

Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan.²² Dalam hubungannya dengan ini, Van Bemmelen mengingatkan dengan mengatakan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah. Dapat dipahami bahwa penangkapan dan penahanan ini mempunyai fungsi prevensi general, akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Sehubungan dengan hal itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksa yang berupa penangkapan dan atau penahanan ini, haruslah terlebih dahulu dilandasi oleh keyakinan adanya *presumption of guilt*. Ini berarti bahwa sebelum aparat penegak hukum itu menentukan sikapnya menahan tersangka, terlebih dahulu harus berusaha

²¹ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.132

²² Andi Hamzah, *hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.127

mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga betul-betul timbul keyakinan akan kesalahan tersangka.²³

Untuk masalah penahanan hendaknya jangan sekali-kali sebagai sarana “bisnis”, artinya sarana untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat finansial yang tidak terpuji yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Misalnya oleh penyidik, maupun oleh orang lain yang bukan penyidik dan bukan penegak hukum tetapi masih terkait dengan proses hukum itu sendiri. Peran mentalitas yang baik dalam hal ini sangat diperlukan untuk tegaknya hukum itu sendiri, harga diri, dan kewibawaan sejati adalah segala-galanya. Kejujuran bagi siapa pun baik sebagai subjek hukum itu sendiri maupun pihak lain yang tidak terlepas dari proses hukum ini sangatlah penting.

Penahanan bukanlah sarana permainan dan sarana “bisnis”, tetapi penahanan adalah keadaan yang sangat memaksa untuk dilakukan penahanan, dimana tidak ada pilihan lain. Misalnya kalau tidak ditahan akan membahayakan hukum itu sendiri, justru tersangkalah yang terancam keselamatannya oleh orang lain. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah sebuah pilihan yang sulit yang harus dilakukan, karena secara internal, apabila terjadi sesuatu terhadap yang ditahan, maka yang melakukan penahanan justru harus menanggung segala resikonya.²⁴

²³ Ansorie Sabuan, dk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa, 1990),h.85

²⁴ Hartono, *penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),173

Tinjauan Umum Pidana Penjara dan Pidana Kurungan

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu:

1. *Pensylvanian System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.
2. *Auburn System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
3. *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Mengapa terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak? Hal itu dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).²⁵

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/Pasal 19 KUHP.
- c. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
- d. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani masing-masing di situ tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP). Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.²⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),h.29

²⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.ke-2,h.120-122

Tinjauan Umum Pemasyarakatan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas kataqwaan kepada Allah SWT, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan pembinaan narapidana yang ditawarkan oleh C.I Harsono (catatan kaki) adalah kesadaran (consciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Menurut Simandjuntak pemasyarakatan adalah menimbulkan derita pada pelanggaran hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing pelanggaran hukum supaya bertobat dan mendidik pelanggaran hukum supaya menjadi anggota masyarakat berguna.

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeuti*, dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sebaliknya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu :

1. Tahap pertama. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.
2. Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *sepertiga* dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.
3. Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *setengah* dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.
4. Tahap keempat. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *dua per tiga* dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Sistem penjara yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dimana sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan dari Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunan saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan. Desain fisik lembaga Pemasyarakatan baru, justru berbeda dengan konsep pemasyarakatan. Perlu diterapkan yang disampaikan Hazairin dalam bukunya Tujuh Serangkai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Hukum: hidup dalam penjara walaupun dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, pikiran dan hidup kepribadian. Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk menjalankan pidana-pidana tertentu, seperti pidana penjara, dan pidana kurungan, maka hal tersebut sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar, karena yang ditutup dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan itu ternyata bukan hanya orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan sesuatu pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka saja, melainkan juga orang-orang tertentu yang belum dijatuhi dengan sesuatu pidana oleh hakim.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sekarang ini jika terhadap seseorang dikenakan pidana penjara, maka ia akan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan terhadapnya diterapkan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, jenis pidananya tetap bernama pidan penjara, tetapi pelaksanaan pidana penjara itu berdasarkan sistem pemasyarakatan.²⁷ Menurut Kementerian Hukum dan HAM dalam bukunya “pola pembinaan narapidana atas tahanan “, menyebutkan: pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan (narapidana), anak Negara dan bimbingan klien kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani masa pidananya dapat kembali menjadi warga

²⁷Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2012),h.244-245

masyarakat yang baik. Lahirnya sistem pemasyarakatan diakui dan ditetapkan bertepatan dengan dilaksanakannya konferensi kerja jawatan kepenjaraan seluruh Indonesia di Lembang-Bandung pada tanggal 27 April 1964. Salah satu putusan yang ditetapkan adalah bahwa pada setiap tanggal 27 April diperingati sebagai hari lahirnya system pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah wadah yang berfungsi sebagai penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditemui dan dikeluarkan oleh Lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Masuknya terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Hal demikian dilakukan dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru di sekitarnya dalam masyarakat.

Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu “istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditetapkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia”. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya. Jadi lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang dikhususkan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana atau terpidana. Pembinaan narapidana yang dimaksud bukan hanya pembinaan yang berpaku pada prinsip-prinsip pembinaan melainkan termasuk bagaimanakah tata cara membina yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan pada kenyataannya serta hasil yang didapatkan dari pembinaan itu. Apakah narapidana menjadi seseorang yang lebih baik karena proses pembinaan atau bahkan binaan yang diberikan sama sekali tidak mempengaruhi narapidana tersebut.

Pada kenyataannya saat ini karena terbatasnya sarana untuk tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa, yang seharusnya ditahan di rumah tahanan negara (rutan), maka dalam prakteknya Lembaga Pemasyarakatan berfungsi juga sebagai rumah tahanan negara. Tugas-tugas sosial yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan memberikan wewenang padanya untuk menilai sikap perilaku terpidana dan menentukan langkah apa yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut. Hasil penilaian ini mendorong untuk diberikan upaya-upaya yang meringankan terpidana selama menjalani pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Upaya-upaya tersebut berupa pemberian remisi atau pelepasan bersyarat, yang kesemuanya mengarah agar terpidana tidak berbuat jahat lagi nantinya. Fungsi sosial dari Lembaga Pemasyarakatan diwujudkan dengan memberikan pendidikan dan keterampilan bagi terpidana, serta pembinaan moral dan tingkah laku yang baik serta bermanfaat.²⁸

F. Tinjauan Umum Tata Tertib

Dalam suatu golongan terdapat aliran yang beranekaragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, tetapi kepentingan

²⁸Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),h.125-126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan suatu golongan tersebut. Adapun yang memimpin kehidupan bersama yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu golongan itu adalah peraturan hidup. Agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman dan tentram damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata. Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa arab) atau norma (berasal dari bahasa latin). Norma-norma itu mempunyai dua macam isi dan menurut isinya berwujud:

1. Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk merebut sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik.
2. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat oleh karena akibatnya dipandang tidak baik.

Adapun gunanya norma adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Norma-norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu penghukuman terhadap berlakunya norma tadi dan merupakan pola reaksi terhadap perbuatan yang mengambil norma.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahwa :

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian eberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru kurang efektif, dikarenakan kurangnya pengawasan yang ketat dari kepala lembaga pemasyarakatan terhadap petugas lembaga pemasyarakatan tersebut. Maka dari itu masih ada saja Narapidana yang melanggar Tata Tertib.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata tertib di lembaga pemasyarakatan ialah masih adanya kesempatan yang diberikan oleh aparat untuk melakukan pelanggaran tata tertib dan bahkan dilindungi oleh aparat tersebut. Dan dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana, lembaga pemasyaraktan melakukan atau memberikan peringatan atau teguran, menjebloskan ke dalam sel apabila narapidana tersebut melakukan pelanggaran berat dan tidak memberikan remisi apabila telah berulang kali melakukan pelanggaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintahan seharusnya lebih memperhatikan kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan, bukan hanya di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru tetapi juga Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Indonesia, dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
2. Jumlah penghuni Narapidana yang melebihi kapasitas/overload merupakan salah satu penghambat yang tidak mudah untuk diatasi. Hal ini sangat mungkin terjadi pada setiap Lembaga Pemasyarakatan, dan seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan menambah bangunan Lembaga Pemasyarakatan. Kepala pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru agar membuat standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah penghuni serta pengadaan alat-alat yang memiliki standar kebutuhan misalnya alat pengendalian masa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jurnal

Yoga, *Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Ilmiah 2016.

Ainal, *Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Kanun Jurnal Volume 16 Nomor 62, April 2014.

Skripsi

Salamat, *Skripsi: Efektivitas Perlindungan Hak Narapidana wanita Berdasarkan Undnag-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Internet

<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>

<http://lapaspekanbaru.com/visi-dan-misi->

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-stuktur-organisasi?view=categoryhuruf&id=30>

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana kondisi keamanan bagi narapidana di LAPAS ?

Jawab :

2. Bagaimana sistem Tata Tertib yang dilakukan di LAPAS ?

Jawab :

3. Bagaimana pelaksanaan tentang sosialisasi Peraturan atau Tata Tertib diLAPAS ?

Jawab :

4. Peristiwa apa yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Narapidana dalam waktu 2 tahun terakhir ?

Jawab :

5. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Narapidana yang melakukan pelanggaran ?

Jawab :

6. Apakah ada perlindungan terhadap keselamatan Narapidana di dalam LAPAS selama masa tahanan ?

Jawab :

7. Apakah ada fasilitas yang diterima Narapida selama masa tahanan di LAPAS ?

Jawab :

8. Bagaimana pengawasan yg dilakukan terhadap Narapidana ketika kedatangan kunjungan di LAPAS ?

Jawab :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. © Bagaimana pengawalan yang dilakukan terhadap Narapidana ?

Jawab :

10. Bagaimana penjagaan yang dilakukan terhadap Narapidana di LAPAS ?

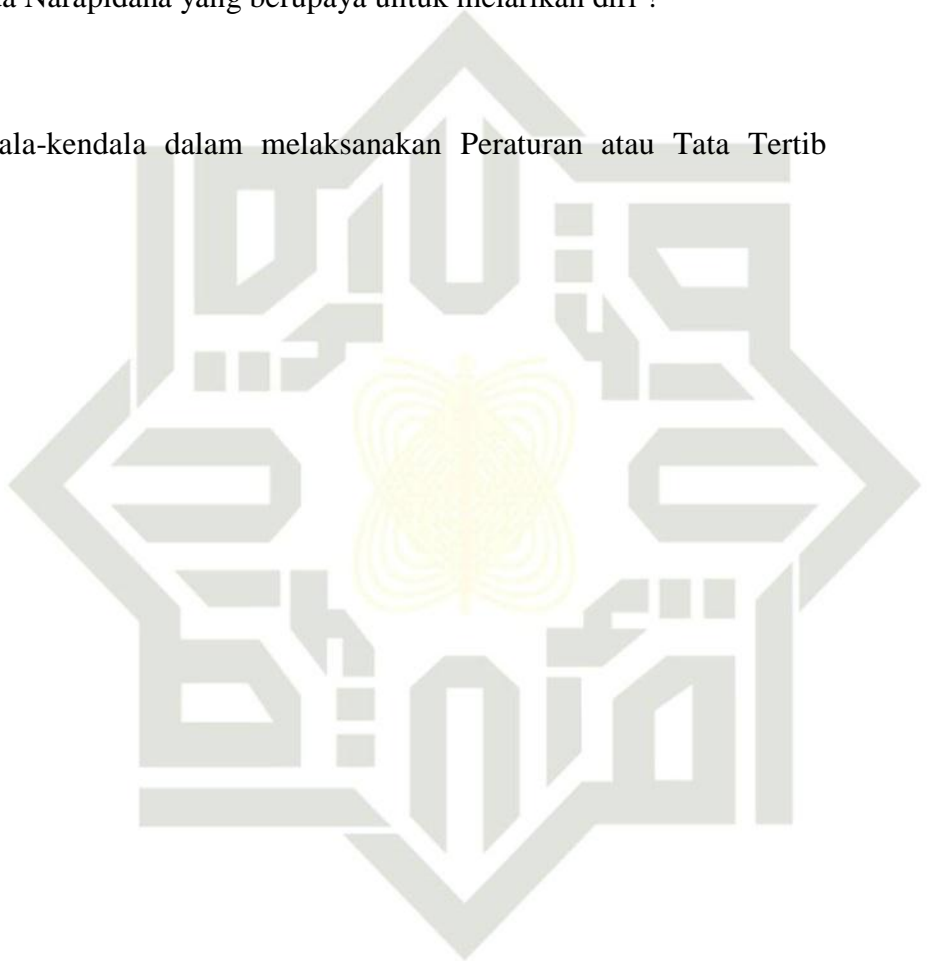
Jawab :

11. Apakah ada Narapidana yang berupaya untuk melarikan diri ?

Jawab :

12. Apa kendala-kendala dalam melaksanakan Peraturan atau Tata Tertib tersebut ?

Jawab :



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 06 TAHUN 2013 BAGI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KOTA PEKANBARU yang ditulis oleh :

Nama : Mai Kurnia Pulungan
NIM : 11527201039
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH
Sekretaris
Musrifah, SH., MH
Penguji I
Dr. H. Suhayib, MA
Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MAI KURNIA PULUNGAN**

NIM : **11527201039**

Jurusan : **ILMU HUKUM**

Judul : **PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 06 TAHUN 2013 BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA KOTA PEKANBARU**

Pembimbing : **Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 November 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Sahril, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1987/2019 Pekanbaru, 05 Maret 2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MAI KURNIA PULUNGAN
NIM : 11527201039
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RIAU (LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
PEKANBARU)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA YANG MELANGGAR
TATA TERTIB PADA PASAL 10 PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Kasus Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 0054

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

Jalan : Pemasyarakatan No.19 Pekanbaru Kode Pos : 28282
Telp/Fax : 0761-22262, Email : keuanganlapaspk@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W4.PAS.PAS.1-HM.02.03-0938

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, menerangkan bahwa:

Nama : **Mai Kurnia Pulungan**

No. Mahasiswa : 11527201039

Program Studi : Ilmu Hukum

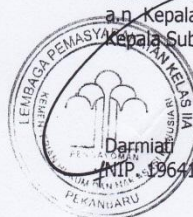
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa yang bersangkutan adalah benar telah melakukan penelitian dan mengambil data-data untuk tujuan menyusun tugas akhir (skripsi) di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Adapun judul skripsi yang bersangkutan adalah: "**PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PEKANBARU**"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 24 Juli 2019

a.n. Kepala,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Darmiat
NIP. 19641122 198503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/19619
TENTANG



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1987/2019 Tanggal 5 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

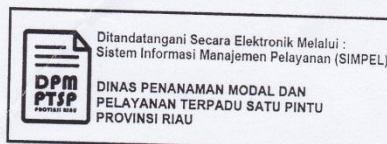
1. Nama : MAI KURNIA PULUNGAN
2. NIM / KTP : 11527201039
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB PADA PASAL 10 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PEKANBARU)
7. Lokasi Penelitian : KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU)

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Maret 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



RIWAYAT PENULIS

Nama lengkap penulis adalah **Mai Kurnia Pulungan**. Lahir di AFD III pada tanggal 30 Mei 1997 , penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Suharuddin Pulungan dan ibu Kesuma Wati. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Sei Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di Sei Tapung, dan menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 002 Tandun pada tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTS Darul Ulum Tandun pada tahun 2009-2012, selanjutnya penulis menempuh pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di MA Darul Ulum Tandun pada tahun 2012-2015.

Dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kejaksaan Tinggi Riau. Dan pada tahun 2018 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Kumam Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Selama menempuh pendidikan di Universitas, penulis aktif di organisasi Rohani Islam (Rohis) yakni di Rohis Fakultas (Fk-Massya) dan Rohis Universitas (Fkii Asy-Syams). Dan pada tanggal 15 Oktober 2019 penulis mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan judul penelitian **"PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 06 TAHUN 2013 BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KOTA PEKANBARU"**.

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.